

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terjadinya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor. Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang auditor pemerintahan

yang terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, satuan pengawas intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/ BUMD Inspektorat wilayah propinsi (Itwilprop), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, dkk 2009).

Menurut Mulyadi (2014) audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan - pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar.

Fungsi audit akan efektif dan optimal apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. Kompetensi yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Dengan adanya aturan kode etik, masyarakat atau

pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Kualitas hasil auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit.

Kualitas hasil audit sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena dengan kualitas hasil audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus dalam rangka menentukan kesesuaian informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi Aparat Intern Pemerintah Daerah (APIPDA).

Audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Dalam audit kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan.

Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain obyektifitas, Integritas, pengalaman dan kompetensi. Obyektifitas merupakan salah satu ciri

yang membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip obyektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Kompetensi auditor merupakan auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif, cermat dan seksama.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan **aparatus pengawasan intern pemerintah.**” Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit.

Kondisi saat ini, masih ada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan tatakelola pemerintahan yang baik. Banyak terjadi kasus di sejumlah daerah yang berkaitan dengan masalah korupsi, ketidakberesan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran, dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomena hasil audit di kabupaten sumenep 2015 masih konsisten dengan raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti tahun sebelumnya. Opini Wajar Dengan Pengecualian adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu. Namun demikian, ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Perlu diketahui, hasil audit BPK dalam beberapa tahun terakhir, selalu memberikan opini WDP ke Kabupaten Sumenep atas laporan keuangannya. Jika tahun lalu, yang menjadi penyebab perolehan WDP, antara lain administrasi yang belum tertata rapi, ketidakwajaran administrasi yang kecil, pengelolaan aset yang buruk serta penyertaan modal BUMD bermasalah. (Media Madura: 2016)

Berdasarkan uraian di atas dan kondisi real yang ada pada Inspektorat Kabupaten Sumenep serta keterbatasan jumlah auditor dan kompetensi teknis yang dimiliki, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang dengan judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS HASIL AUDIT INTERNAL DALAM KEUANGAN DAERAH”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Apakah terdapat pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Apakah terdapat pengaruh antara integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh antara obyektifitas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara kompetensi auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara integritas auditor terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi peneliti.
2. Bagi Lingkungan Pemerintah Daerah Menambah pengetahuan bahwa dalam suatu pemerintah daerah perlu adanya kualitas dalam penilaian suatu audit.
3. Bagi Peneliti Sebelumnya Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau penelitian lain untuk menjadi perbandingan terhadap masalah masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas 5 bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis sebagai alternatif pemecahan sementara.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang serupa di masa yang akan datang.